

Ilustrasi: Upavasa Cyadzidananda

# ***The Journey for Pride***

*Kisah Orang-Orang Hitu di Pesisir  
Utara Pulau Ambon Merebut Kembali  
Supremasi Identitasnya*

*Fahmi Sirma Pelu*

Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya  
Universitas Gadjah Mada  
fahmipel22@icloud.com

### **Abstract**

*The people of Hitu have been situated as the multicultural society by the trading port settled under their authority. Many foreign cultures were internalized to become a part of Hitu's culture that is expressed by historical stories, myth, folklore, and language. In the late 16th century, Portuguese were forced to leave Hitu and moved to the south-peninsula of Ambon island. They built the new port and have affected significantly through Hitu people identifying themselves. This article tries to explain the beginning process until the colonial period of how multicultural Hitu was able to be established, the impacts of moving-port through their self-identification, and identity conflict between Hitu people and other communities. A hypothesis arising in this research is that Hitu people have stopped their self-identification in the Portuguese colonial period. The implication is they failed to contextualize their own need for today and in the future. This article uses Madan Sarup's identity approaches Sarup states, identity is a never-ending process. So, why do Hitu people feel that they have finished their identification on themselves and its implication on their needs?*

*Keyword: Hitu, multicultural society, Ambon, identity, identity conflict*

### **Abstrak**

Berkat keberadaan pelabuhan, orang-orang Hitu telah dibentuk menjadi masyarakat multikultur. Berbagai pengaruh kebudayaan luar diinternalisasi menjadi bagian dari kebudayaan mereka yang diekspresikan lewat kisah-kisah sejarah, mitos, mantra-mantra, dan bahasa. Pada akhir abad ke-16, Portugis yang terusir dari Hitu kemudian mendirikan pusat pelabuhan di Semenanjung selatan—cikal bakal Kota Ambon saat ini. Pemandahan tersebut telah berdampak sangat signifikan terhadap identifikasi orang-orang Hitu atas dirinya. Artikel ini akan menggali proses awal pembentukan masyarakat multikultur Hitu sampai dengan era kolonial, dampak pemindahan pelabuhan terhadap identifikasi orang-orang Hitu atas dirinya sendiri dan konflik identitas yang melibatkan mereka dengan kelompok lain. Hipotesa yang dikemukakan dalam penelitian ini, ialah berhentinya identifikasi orang-orang Hitu atas identitasnya pada kealahannya secara ekonomi dan politik di kawasan sejak dipindahkannya pelabuhan oleh Portugis. Implikasinya, mereka gagal memperbaharui kebutuhan atas diri mereka hari ini dan esok. Artikel ini menggunakan pendekatan identitas yang dikemukakan oleh Madan Sarup. Sarup melihat bahwa identitas merupakan proses yang tidak pernah selesai. Lantas, mengapa identifikasi orang-orang Hitu berhenti pada satu peristiwa sejarah saja dan belum juga dapat beranjak daripadanya?

*Kata Kunci: Hitu, masyarakat multikultur, Ambon, identitas, konflik identitas*

## Pendahuluan

Berbagai keluarga di Hitu<sup>1</sup> menyimpan kisah panjang yang beragam dan rumit mengenai kedatangan leluhurnya ke Tanah Hitu. Keluarga Pelu, misalnya, menuturkan bahwa nenek moyang mereka melakukan perjalanan rahasia dari Madinah menuju Hitu.<sup>2</sup> Keluarga Ruhunussa menuturkan bahwa mereka berasal dari Melaka, kemudian melakukan pelayaran sampai di pesisir Hitu. Meskipun motifnya tidak begitu jelas dan tidak mudah diungkap, tuturan tersebut telah berkembang di tengah-tengah masyarakat dan diyakini kebenarannya.

Saya memulai penelitian ini dengan asumsi bahwa masyarakat Hitu merupakan masyarakat multikultur, ditilik dari penjelasan asal-muasal mereka yang sangat beragam. Dari beragamnya kisah perjalanan leluhur mereka ke Tanah Hitu, satu hal yang pasti bagi mereka adalah leluhur mereka merupakan para penyiari agama Islam. Elemen Islam yang kuat diakui oleh masyarakat lewat pernyataan mereka bahwa ajaran Islam sudah menjadi bagian dari kebudayaannya, “agama dan adat di sini berjalan beriringan dan saling melengkapi satu sama lain.” Ungkapan tersebut cukup umum dituturkan oleh sebagian besar masyarakat Hitu.

Ungkapan tersebut tentu tidak muncul begitu saja. Di balik penjelasan sederhana mereka, terentang peristiwa sejarah panjang—peperangan, penaklukan, kekalahan, dan perdamaian. Saya menyoroti satu peristiwa penting yang berdampak pada proses identifikasi mereka atas identitasnya sebagai orang

Hitu, yakni pemindahan pelabuhan utama di Pulau Ambon oleh Portugis. Pada awalnya, pelabuhan utama di kawasan itu berada di Semenanjung Hitu di utara Pulau Ambon, dipindahkan ke Semenanjung selatan di daerah Teluk Ambon yang menjadi cikal bakal Kota Ambon saat ini. Asumsi saya, pelabuhan telah menjadi pintu masuk dan keluar masyarakat Hitu untuk berhubungan dengan dunia luar. Pelabuhan juga telah menempatkan mereka pada jejaring global lewat urusan perdagangan rempah yang mengundang para pelayar dari segala penjuru dunia ke Maluku.

Peran pelabuhan menjadi sangat krusial bagi masyarakat Hitu. Pasalnya, mereka juga menggantungkan hidup lewat kontak dagang dengan para pelayar asing. Oleh karena itu, pemindahan pelabuhan telah membawa dampak berkelanjutan yang rumit. Hal ini berkaitan dengan berubahnya titik pusat dan pinggiran dalam konteks sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan.

Sebagai salah satu implikasi atas pemindahan pelabuhan oleh Portugis terhadap pembentukan identitas masyarakat Hitu. Konflik Ambon 1999 dan konflik antardesa yang terjadi hampir setiap tahun pasca konflik Ambon 1999 dapat dilihat tidak hanya sebagai medan kontak fisik semata, melainkan sebagai medan perang identitas. Misalnya, dalam menanggapi persoalan konflik antardesa, sebagian besar pemuda Hitu yang saya wawancarai mengungkapkan bahwa dirinya sebagai orang Hitu adalah orang-orang terkemuka dan yang paling awal membangun peradaban di pulau Ambon, sehingga berperang dengan kelompok

1. Hitu mencakup dua desa administrasi, Hitu Lama dan Hitu Messing. Terletak di pesisir utara Pulau Ambon dan tergabung dalam wilayah administrasi Kab. Maluku Tengah. Lihat Gambar 1

2. Nenek moyang mereka ini kemudian diberi gelar Yasirullah yang berarti “yang melakukan perjalanan rahasia”

lain menjadi sebuah keharusan. Dengan alasan demikian, identitas sebagai orang Hitu harus dipertahankan statusnya sebagai yang terkemuka dan terdepan di antara kelompok lainnya. Jika gugatan atas status tersebut mencuat, maka perang antarkelompok sangat mungkin terjadi.

Mengapa Hitu yang dibangun dengan berbagai prinsip keberagaman menjadi begitu kaku dan menganggap proses pembentukan identitas mereka sudah selesai sehingga gugatan atasnya menjadi haram? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, artikel ini akan diawali dengan konteks historis terbentuknya persekutuan Tanah Hitu sebagai upaya awal mengidentifikasi identitas sosial masyarakat Hitu. Selanjutnya, saya akan menjabarkan bagaimana proses pembentukan identitas itu dari waktu ke waktu—pada masa sebelum kedatangan kolonial, pendudukan kolonial, dan pasca pendudukan kolonial. Beberapa objek pengujian yang saya kumpulkan, di antaranya bahasa, tuturan, dan ungkapan orang-orang Hitu menanggapi pelbagai peristiwa yang dihadapinya. Setelah itu, saya akan menjabarkan persinggungan identitas mereka dengan kelompok lain dalam konflik Ambon dan konflik antardesa sebagai penolakan atas gugatan terhadap supremasi identitas mereka. Di akhir, saya mencoba menguji, apakah pemerintah adat dapat—atau seharusnya—merencanakan “siapa yang kemudian akan disebut sebagai orang-orang Hitu?” Pertanyaan tersebut dibangun atas anggapan bahwa institusi

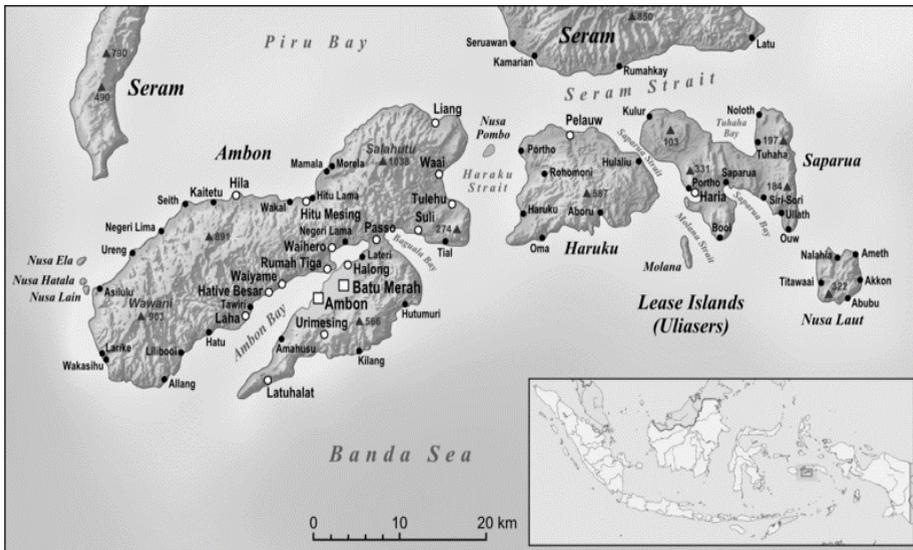
adat berada pada garda paling depan untuk melindungi nilai-nilai adat istiadat dan kebudayaannya. Dengan demikian, upaya membaca situasi dan kondisi zaman serta kontekstualisasi praktek adat-istiadat dan kebudayaan dapat berjalan selaras dengan nilai-nilainya yang mengakar di tengah masyarakat.

Artikel ini akan memfokuskan pokok bahasan pada permasalahan identitas yang muncul pasca pemindahan pelabuhan oleh Portugis sebagai titik balik atas pengidentifikasian diri mereka. Asumsi yang akan coba diuji dalam artikel ini berpusat pada dampak-dampak yang dihasilkan setelah pusat aktivitas ekonomi dan politik itu dipindahkan dari Hitu ke Teluk Ambon. Artikel ini memakai sudut pandang masyarakat Hitu dalam melihat diri dan orang di sekitarnya sebagai upaya untuk menelusuri kembali pembentukan identitas sosial dari rekam jejak sejarah serta dampak-dampaknya dari sudut pandang “orang-orang kalah”.<sup>3</sup>

Madan Sarup (1996) berpendapat bahwa ketika membicarakan tentang identitas, terdapat proses seleksi, perhatian khusus, dan pengukuran yang hati-hati dari dampak yang ditimbulkan oleh dinamika-dinamika sosial, seperti kelas, bangsa, ‘ras’, etnis, gender, dan agama. Kita semua menghubungkan dinamika-dinamika sosial itu dan mengorganisasikannya ke dalam narasi. Jika seseorang bertanya perihal identitas teman atau orang yang baru ia kenal, jawaban berupa sebuah cerita akan muncul. Identitas kita tidak terpisah dengan apa yang sudah terjadi.<sup>4</sup> Sarup

3. Dalam pengantar-nya “Memotret Wajah Kita Sendiri,” dalam buku *Orang-orang Kalah*, P. M. Laksono, menyimpulkan bahwa dari kumpulan laporan penelitian di dalam buku tersebut, wajah manusia Maluku adalah potret wajah orang-orang kalah. Mereka jadi pecundang karena tragedi sejarah. Lihat Roem Topatimasang (ed.), *Orang-orang Kalah: Kisah Penyingkiran Masyarakat Adat di Kepulauan Maluku* (Yogyakarta: Insist Press, 2016): 1.

4. Madan Sarup, *Identity, Culture and the Postmodern World* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1996): 15.



Gambar 1

juga menambahkan bahwa identitas merupakan sebuah proses yang terus berlangsung, terjadi dalam berbagai tingkatan, dalam berbagai praktik dan pengalaman.<sup>5</sup>

Catatan mengenai Hitu sebelum era kolonial memang masih sangat sedikit dan sulit ditelusuri. Terlebih lagi, sebagian besar sumber lokal masih dianggap sakral untuk dibuka kepada khalayak umum. Beberapa penulis kolonial seperti Rumphius, ahli botani asal Jerman yang bekerja untuk Belanda; Valentijn, dan Holemman telah cukup banyak memberikan gambaran atas keadaan dan situasi Pulau Ambon di era kolonial Belanda. Penelitian ini bersifat observasi-partisipatoris dengan mengambil data primer dan sekunder di Desa Hitu Lama dan Hitu Messing, Kec. Leihitu, Kab. Maluku Tengah. Data primer didapat dengan melakukan observasi langsung dengan mengamati ungkapan-ungkapan mereka dalam interaksi sosialnya dengan sesama anggota kelompok dan kelompok lain. Data primer juga didapat dari wawancara langsung dengan para tokoh adat dan masyarakat di Desa Hitu Lama dan Desa Hitu Messing. Data sekunder difokuskan pada penelusuran sumber lokal berupa mantra dan catatan sejarah serta laporan penelitian lainnya yang banyak ditulis oleh Collins dalam bidang linguistik dan beberapa peneliti sejarah Ambon seperti Knaap dan Fraassen.

5. Sarup, *Identity, Culture and the Postmodern World*, 40.

## Konteks Historis

Ridjali, dalam *Hikayat Tanah Hitu*<sup>6</sup>, memberikan informasi mengenai bagaimana para keempat pendatang pertama di Hitu atau dalam bahasa Hitu disebut *Hitu'a Upu Hata*, bermufakat setelah beberapa di antara mereka bersiteru mengenai siapa yang paling berhak memerintah Tanah Hitu. Mufakat itu menghasilkan kesepakatan untuk mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin, seorang raja. Awalnya, mereka hidup terpisah membentuk kampungnya masing-masing. Keempat kelompok pertama itu kemudian bersekutu dengan tiga kelompok lainnya, yakni Tomu, Hunut, dan Masapal. Yang disebut Hitu adalah persekutuan tujuh kelompok keluarga, empat keluarga pendatang pertama (Zamanjadi, Mulai, Nustapi, dan Patti Tuban) ditambah tiga kelompok lain yang mendiami pedalaman hutan (Tomu, Hunut, dan Masapal) sebagaimana arti dari "Hitu"—dalam bahasa lokal—sendiri yang artinya "tujuh". Ketiga kaum tersebut merupakan kelompok yang telah lebih dahulu menempati Pulau Ambon dan pulau-pulau sekitarnya—masyarakat Hitu menyebut mereka sebagai *Hu'ul*.

Kelompok marga atau fam yang berasal dari keempat kelompok pendatang tersebut seringkali menolak mengidentifikasi diri mereka sebagai "orang asli" dengan mengacu pada kelompok *Hu'ul* sebagai referennya. Oleh karena itu, istilah "orang asli" Pulau Ambon sangat tidak populer di tengah

masyarakat Hitu. Orang-orang Hitu menjelaskan dirinya sebagai "orang Hitu" yang terdiri dari ketujuh kelompok itu sebagai sintesis atas perdebatan tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Yahya Pelu, bergelar adat Tukang Ela'—mengatur segala urusan masjid Hitu:

Adat dan agama berjalan beriringan di sini. Hal itu dapat kita lihat dalam praktek pengukuhan jabatan adat yang dilakukan di masjid sebelum ibadah shalat Jumat dilaksanakan. Masjid dan ibadah shalat sebagai simbol agama Islam dapat memfasilitasi pengukuhan jabatan adat yang istilahnya menggunakan bahasa lokal, bahasa Hitu, dan tugas serta fungsi jabatannya mengatur urusan adat dan hukum-hukum Islam.<sup>7</sup>

Kelompok pendatang yang notabene-nya merupakan para penyiar agama Islam di tengah masyarakat dinilai sebagai representasi agama. Sementara itu, praktik adat-istiadat menjadi representasi atas keberadaan kelompok *Hu'ul*. Uraian Yahya Pelu mempertegas anggapan tersebut. Keberadaan masjid sebagai simbol agama dan jabatan adat sebagai simbol adat istiadat disatukan dalam satu seremoni pengukuhan jabatan adat. Ini yang saya sebutkan di awal sebagai identitas orang Hitu paling awal dan yang paling tegas mereka jelaskan sebagai Orang Hitu.

Babak baru proses pengidentifikasian diri mereka sebagai orang Hitu dimulai ketika Portugis pertama kali menginjakkan kakinya di pelabuhan Huseka'a, Hitu. Menurut catatan Ridjali,

6. Z. J. Manusama, *Historie en sociale structuur van Hitu tot hed midden der zeventiende eeuw*; diperkenalkan oleh Chris F. van Fraassen (Utrecht: Moluks Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers, 2004): 98. Manusama memperoleh gelar doktor di Universitas Leiden pada tahun 1977 dalam studinya tentang *Hikayat Tanah Hitu*; sejarah dan struktur sosial kepulauan Ambon pada umumnya dan *Uli Hitu* secara khusus sampai pertengahan abad ke-17. Berisi transliterasi dan terjemahan hikayat yang ditulis oleh Ridjali tentang kebangkitan dan keruntuhan pemerintahan Hitu (1500—1646). Versi digital *Hikayat Tanah Hitu* (versi yang sudah ditranslasi oleh Manusama ke dalam aksara latin—mulanya menggunakan Jawi) terdapat ditemukan di Australia National University (anu.edu.au).

7. Wawancara dengan Yahya Pelu, 11 Agustus 2019.

Portugis diizinkan untuk mendirikan sebuah rumah di antara Hitu dan Mamala. Sebelum akhirnya, otoritas Hitu mulai risih dengan perilaku orang-orang Portugis yang suka mabuk-mabukan. Akhirnya, dipindahkanlah mereka ke pantai Honipopu, Teluk Ambon.<sup>8</sup> Setelah ditempatkan di Pantai Honipopu—lokasi Kota Ambon saat ini—Portugis mulai melancarkan perang dan penaklukan ke daerah dan pulau-pulau sekitar Ambon. Perang antara kedua belah pihak, antara Portugis dan Hitu, tidak dapat dihindari. Kedua belah pihak saling serang. Jamilu, salah seorang Perdana Hitu'a Upu Hata, berlayar ke Jepara dan meminta bantuan kepada Pangeran Jepara untuk menyerang Portugis.

Portugis terus membangun setelmen di sekitar bentengnya di Pantai Honipopu. Mereka mengambil para tawanan perang dan imigran dari luar Ambon untuk mengisi setelmen di sekitar benteng.

Ada beberapa nama kampung di sekitar kota Ambon saat ini yang sama dengan nama kampung di beberapa lokasi di sekitar Pulau Ambon dan Seram, seperti Tawiri. Kebanyakan, mereka itu orang yang kalah perang. Portugis tempatkan mereka di sekitar benteng.<sup>9</sup>

Setelmen-setelmen itu mengalami beberapa kali serangan serius yang mengarah pada keberadaan benteng Portugis di Teluk Ambon. Setelmen

Portugis berhasil bertahan dari beberapa serangan serius pada 1591, 1593, dan 1598. Pasukan yang menyerang Portugis merupakan Muslim Ambon yang didukung oleh kekuatan Ternate dan Jawa.<sup>10</sup>

Pelabuhan, benteng, dan setelmen yang mulai dibangun oleh Portugis di Teluk Ambon memainkan peran penting sebagai kota pelabuhan di timur Nusantara. Hal tersebut telah menjadikan kota pelabuhan Ambon menjadi persinggahan utama menuju Ternate sebagai pusat penghasil cengkeh dan Banda sebagai pusat penghasil pala.<sup>11</sup> Peran ini awalnya dimainkan oleh pelabuhan Hitu sebelum kedatangan Portugis ke Pulau Ambon.

Setelah pelabuhan dipindahkan, orang-orang Hitu terpaksa harus tunduk pada monopoli Portugis. Di awal pembangunan Kota Ambon pada 1576, tidak ada keterlibatan orang-orang Hitu. Penduduk kota didominasi oleh para imigran dari luar Ambon, utamanya para budak yang diperjualbelikan oleh majikannya. Jumlah populasi budak di Ambon menjadi yang terbesar di antara kelas sosial lainnya. Orang Hitu tidak hadir sebagai bagian dari populasi kota. Pada periode tersebut, orang Hitu tetap menjadi sebuah fenomena yang asing bagi kehidupan kota.<sup>12</sup>

Konsekuensi yang harus ditanggung oleh orang Hitu, yang paling utama,

8. Teks asli (ditranslasi oleh Manusama): *sekali perastawa, ia minum mabuk, lalu berampas-rampasan serta haru-biru dalam pasar. Maka disampaikan kepada hukum dan penghulu agama, maka kata penghulu agama: 'salah orang itu melainkan sampai nyawanya.' Maka kata keempat perdana: 'bennar kata hukum dan penghulu agama, tetapi ampun dahuluh kepadanya. Kemudian kita membuat jahat pula, apa hal nama kita didenggar oleh orang? Baik kita pindahkan dia kepada tempat yang lain, jangan sama senegeri kita. Maka dipindahkan dia ke tanah sebelah kepada tempat yang baik ia duduk, daripada negeri itu tiada beragama dan lagi banyak minuman anggur. Seperkara lagi sama makanannya dan minumannya.*

9. Wawancara dengan Abdullah Pellu, 12 Agustus 2019.

10. Gerrit J. Knaap, "A City of Migrants: Kota Ambon at the End of the Seventeenth Century," *Indonesia* 51 (1991): 106.

11. Knaap, "A City of Migrants: Kota Ambon at the End of the Seventeenth Century," *Indonesia* 51 (1991): 115.

12. Knaap, "A City of Migrants: Kota Ambon at the End of the Seventeenth Century," *Indonesia* 51 (1991): 125.

adalah rute pelayaran dagang yang berubah. Pelabuhan Hitu menjadi relatif sepi. Padahal, Lombard (2008) mencatat bahwa pelabuhan Hitu merupakan mitra penting dan memiliki hubungan baik dengan Jepara dan Giri.<sup>13</sup> Hubungan ini juga berkaitan dengan perdagangan berbagai komoditas dari Jawa dan negeri-negeri lainnya di barat.

Sebagian besar masyarakat yang saya wawancarai tidak dapat menjelaskan banyak hal mengenai kontak-kontak dagang di era sebelum pendudukan Portugis. Bagi mereka, kontak tersebut ada dan dapat dikaji lebih jauh dengan menelusuri berbagai peninggalan para pelayar di era tersebut yang tersimpan di rumah raja.<sup>14</sup> Selain itu, literatur sejarah yang disimpan oleh banyak keluarga di masing-masing rumah pusakanya masih sulit untuk dibuka dengan alasan menjaga rahasia keluarga dan 'aib' keluarga lain—yang mereka nilai sangat mungkin ada dalam narasi sejarah di literatur yang mereka simpan.

### Bahasa Mengungkap Tabir 'Siapa Kita?'

Dalam uraian sebelumnya, saya telah menjabarkan beberapa persoalan yang dihadapi untuk menelusuri konteks historis dari tuturan masyarakat Hitu hari ini. Dalam bagian ini, saya mencoba menelusuri bahasa lokal, bahasa Hitu, dan konteks historis di baliknya untuk membantu pemahaman atas identitas orang-orang Hitu sebelum era pendudukan Portugis.

Mengacu pada Schiffman (1996), bahasa merupakan konstruksi kebudayaan paling elaboratif yang manusia miliki dan juga kendaraan utama dalam proses akulturasi.<sup>15</sup> Dalam perspektif linguistik, bahasa di Kepulauan Maluku merupakan bagian dari rumpun bahasa Austronesia. Beberapa teori linguistik juga telah mencoba menjabarkan dari mana penduduk asli di kepulauan di timur Nusantara berasal dan bagaimana mereka bermigrasi.<sup>16</sup> Beberapa di antaranya mengungkapkan bahwa bangsa Austronesia telah meninggalkan Afrika dan menuju Kepulauan Indonesia dan Pasifik di timur jauh pada sekitar 85.000 tahun yang lalu.<sup>17</sup> Anceaux beranggapan bahwa budaya beras yang dikenal oleh penduduk asli di wilayah kepulauan di Timur menunjukkan bukti bahwa mereka bermigrasi lebih dahulu dari Barat ke Timur sebelum budaya beras itu masuk dari India dan memengaruhi kebudayaan masyarakat Austronesia di sebagian besar wilayah Asia Tenggara. Di Hitu sendiri, mereka menyebut beras atau nasi dengan *ala'* menggunakan kosakata pinjaman dari bahasa Punjabi *chavala* atau bahasa Hindi *chaval*. Sementara itu, nasi telah menjadi makanan pokok masyarakat Hitu. Di luar anggapan bahwa beras menyebar ke berbagai penjuru Indonesia lewat ekspansi kebijakan transmigrasi Orde Baru, masyarakat Hitu memiliki kudapan khas yang berbahan dasar beras seperti *nasi minyak* dan *nasi kelapa*.

13. Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya II* (Jakarta: Gramedia, 2008): 67.

14. Peninggalan-peninggalan tersebut, antara lain: porselen kuno berukiran khas Cina, kendi, piring makan, bejana, dan lain-lain. Saya tidak berkesempatan melihat langsung, namun hal ini dibenarkan oleh beberapa tokoh adat, termasuk raja Hitu Lama, Salhana Pelu.

15. Harold F. Schiffman, *Linguistic Culture and Language Policy* (London: Routledge, 1996): 58.

16. Lihat J. C. Anceaux, "Linguistic Theories About Austronesian Homeland," *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 121 (1965): 417—432.

17. Lihat Stephen Oppenheimer, *Out of Eden: Peopling of the World* (London: Robinson, 2004).

Collins (1993) menjelaskan bahwa Maluku adalah wilayah transisi yang membagi wilayah barat dan timur Austronesia. Wilayah transisi ini telah melalui proses sosial yang sangat rumit yang memengaruhi situasi linguistik di daerah tersebut. Ditambah lagi, keberadaan bahasa Austronesia lain, misalnya bahasa Melayu, yang masuk ke Maluku.<sup>18</sup> Pada abad ke-16, penduduk Pulau Ambon telah mengenal dan aktif menggunakan bahasa Melayu. Faktanya, penulis lokal, Ridjali, menulis *Hikayat Tanah Hitu* menggunakan bahasa Melayu dan tuturannya sangat khas mencirikan karakteristik kesusasteraan Melayu. Collins dalam artikelnya yang berjudul "Language death in Maluku the impact of the VOC" telah menjabarkan sedemikian temuannya perihal bagaimana bahasa lokal Maluku hilang dan mulai digantikan oleh bahasa Melayu dan juga sempat digantikan dengan kebijakan penerapan bahasa Belanda dalam lembaga pendidikan kolonial pada masa itu. Grimes (1991) dalam artikelnya "The Development and use of Ambonese Malay" telah menjelaskan bagaimana bahasa Melayu Ambon perlahan diterima dan dipakai secara dominan di Kepulauan Maluku bagian tengah dan secara khusus di Pulau Ambon.

Dari beberapa naskah lama berupa mantra yang disimpan oleh banyak keluarga di Hitu, bahasa yang digunakan dalam mantra-mantra tersebut menggunakan bahasa Melayu lebih dominan. Istilah-istilah yang tidak berbahasa Melayu biasanya

mengindikasikan nama tempat, nama tokoh atau gelar tertentu. Istilah non-melayu itu biasanya berupa istilah berbahasa lokal dan bahasa Arab. Lihat mantra berikut<sup>19</sup>:

*Bismillahirrahmanirahim*  
*Lailahailallah*  
*Payung aku, payung Rasulullah*  
*Lailahailallah*  
*Dinding aku, dinding Rasulullah*  
*Kabal besi, kabal tembaga*  
*Alias ilmu hitam, ilmu naraka*  
*Barkat lailahailallah*  
*Barkat Muhammad Rasulullah*  
*Barkat Guru bisa mustajab*

Sejauh ini, saya hanya mendapatkan dua naskah mantra yang menggunakan sebagian besar kosakata bahasa lokal (bahasa Hitu). Mantra-mantra dan naskah lama lainnya yang tersimpan di Hitu cukup banyak yang menggunakan Jawi—salah satunya naskah proses pembangunan Rumah Raja Hitu Messing di awal abad ke-19 yang ditulis langsung oleh Raja Hitu Messing pada saat itu.<sup>20</sup> Masyarakat Hitu melihat mantra atau dalam bahasa lokal disebut *pataniti* sebagai sesuatu yang sakral dan amat tertutup. Mantra diberikan secara turun-temurun di keluarga tertentu. Mantra menjadi simbol *kabasaran* yang merefleksikan kekuasaan, kepercayaan, dan prestise keluarga.

Masyarakat Hitu secara aktif menggunakan dua bahasa pengantar dalam kehidupan sehari-harinya: bahasa Hitu dan bahasa Melayu Ambon. Penggunaan bahasa Hitu terbatas pada kehidupan sehari-hari sesama penutur bahasa Hitu yang berada di enam

18. James T. Collins, "Languages of Maluku," *Oceanic Linguistics* 32 (1993): 238.

19. Mantra ini biasanya digunakan untuk melindungi diri (kebal) dari senjata tajam dan ilmu hitam seperti santet dan pelet. Mantra-mantra diberikan secara turun-temurun dari orangtua kepada anak-anaknya yang telah dianggap dewasa dan dapat memikul tanggung jawab serta konsekuensi atas dampak-dampaknya.

20. Wawancara dengan Abdullah Pellu dengan gelaran adat *Upu Kaya* sekaligus raja *negeri* Hitu Messing.

desa, yakni Hila, Wakal, Hitu Lama, Hitu Messing, Mamala, dan Morela. Bahasa Hitu mengambil banyak peran dalam praktek adat istiadat seperti pengangkatan raja, imam, kapitan, dan prosesi lainnya. Selain bahasa Hitu dan bahasa Melayu Ambon, sebagian masyarakat Hitu menguasai aksara Jawi (untuk menulis), bahasa Arab, dan bahasa Belanda. Kemampuan menguasai bahasa-bahasa asing merupakan warisan perdagangan dan kebijakan kolonial dari waktu ke waktu.<sup>21</sup>

Portugis sebagai bangsa Eropa yang pertama kali berlabuh di Hitu memiliki sumbangsih yang besar terhadap kosakata bahasa Hitu saat ini. Selanjutnya, bahasa Hitu juga banyak meminjam kosakata bahasa Belanda. Masyarakat masih dapat mengidentifikasi beberapa kosakata bahasa Hitu yang meminjam kosakata dari bahasa Portugis dan Belanda. Sementara itu, istilah-istilah dan kosakata dari bahasa Melayu dan rumpun bahasa lainnya di Asia Kecil seperti Punjabi dan Hindi tidak dapat dikenali sebagai pinjaman dari bahasa asing. Contohnya seperti penyebutan nasi atau beras tadi, *ala'* tidak dapat diidentifikasi oleh masyarakat Hitu sebagai kosakata serapan dari bahasa asing.

Meyerhoff (2006) beranggapan, penting kiranya demi memahami hubungan antara bahasa dan kehidupan sosial untuk dapat memahami jejaring sosial yang melingkupi penutur bahasa dan menalar pola-pola asosiasi apa saja yang berada di antara orang-orang dengan teman-temannya atau dengan kelompok lain yang secara sosial setara

di dalam sebuah komunitas.<sup>22</sup> Meyerhoff beranggapan bahwa memahami jejaring sosial ini penting untuk dapat memahami perubahan-perubahan linguistik yang terjadi di suatu masyarakat penutur.

Meyerhoff membagi jejaring sosial dalam masyarakat penutur ke dalam dua kategori, *dense* dan *loose network*. *Dense network* dikarakterisasi oleh setiap orang di dalam jejaring yang satu sama lainnya saling mengenal. Sementara itu, *loose network*, tidak semua anggota masyarakat mengenal satu sama lain. Distingsi antara keduanya menjadi penting untuk memahami bagaimana perubahan dicapai dalam komunitas.

Pada periode awal sebelum kedatangan penjajah, masyarakat Hitu memiliki jejaring sosial yang melingkupi komunitas lokalnya dengan komunitas pedagang asing. Pada urusan dagang di pelabuhan, mereka memiliki *loose network* di mana mereka tidak mengenal satu sama lain dalam urusan perniagaan tersebut. Dalam *loose network*, anggota komunitas dapat menjadi lebih terbuka terhadap perubahan.<sup>23</sup> Dorongan yang bersifat normatif dari setiap jejaring akan semakin diperlemah. Hal dikarenakan anggapan bahwa penutur harus menempatkan diri pada norma-norma dari banyaknya jejaring yang berbeda dengan ikatan sosialnya yang longgar memberikan mereka keanggotan dalam jejaring sosial.

Freire dan Mecedo berpendapat bahwa bahasa tidak lagi dapat diartikan sebatas alat komunikasi semata melainkan sebagai sebuah identitas dan solidaritas.<sup>24</sup> Orang-orang Hitu dalam urusan kebahasaannya dengan kelompok

21. Lihat pembabakan kebijakan bahasa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial dari waktu ke waktu pada Tabel 1.

22. Miriam Meyerhoff, *Introducing Sociolinguistics* (New York: Routledge, 2006): 186.

23. Meyerhoff, *Introducing Sociolinguistics*, 187.

24. Paulo Freire, (penej.) Donaldo Macedo, *The Politics of Education: Culture, Power and Liberation*

asing telah dibentuk menjadi sangat terbuka dikarenakan jejaring sosialnya yang mengharuskan mereka untuk sedia membuka seluas-luasnya pengaruh-pengaruh luar yang masuk. Sarup (1996) menganggap bahwa identitas merupakan mediasi konsep-konsep eksternal dan internal. Dengan demikian, identitas dapat menjadi 'alat' penting bagi manusia untuk memahami dunia dan kehidupannya.<sup>25</sup> Oleh karena itu, penerimaan bahasa asing dan diserap ke dalam bahasa Hitu menjadi penting bagi orang-orang Hitu semata untuk mereka memahami dunia dan kehidupannya saat itu.

Pengaruh bahasa Portugis dan Belanda ke dalam bahasa Hitu mungkin menjadi pengecualian sebab diperlukannya pengamatan khusus atas relasi antara masyarakat Hitu dan pemerintah kolonial yang berkuasa. Collins melihat bahwa ketiadaan afiliasi yang mengikat masyarakat Hitu dengan pemerintah kolonial menyebabkan bahasa lokal Hitu masih dapat bertahan di tengah hilangnya bahasa lokal dari saudara Kristen mereka. Afiliasi keagamaan, menurut Collins, menjadi salah satu faktor mengapa bahasa lokal hilang dari komunitas Kristen Ambon. Pengaruh kosakata Portugis dan Belanda terhadap bahasa Hitu lebih menunjukkan sifatnya yang tidak setara.

Komunitas Kristen Ambon mendapatkan pengaruh kebahasaan yang lebih signifikan dikarenakan adanya aktivitas khusus yang berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah kolonial. Teks-teks keagamaan di gereja pada masa pemerintahan Belanda, misalnya, diwajibkan untuk menggunakan

bahasa Melayu dan dalam periode lainnya menggunakan bahasa Belanda. Sementara itu, masyarakat Hitu tidak memiliki kewajiban atas aktivitas khusus seperti itu dikarenakan tidak ada afiliasi keagamaan yang terbangun antara mereka dengan pemerintah kolonial. Asumsi saya bahwa kosakata dan pengaruh bahasa Portugis dan Belanda terbentuk dari upaya masyarakat Hitu untuk mengasosiasikan dirinya dengan pemerintah kolonial demi kelancaran hubungan ekonomi dan politiknya. Asumsi selanjutnya, dekatnya pemerintah kolonial dengan komunitas Kristen juga telah memengaruhi gaya hidup masyarakat Kristen, misalnya bagaimana mereka berperilaku dan berpakaian.

Hal ini kemudian berimbas pada masyarakat pinggiran, masyarakat Hitu. Selepas pemindahan pelabuhan, Hitu secara otomatis menjadi *peripheral society* dan pemerintah kolonial bersama sekutu Kristennya menjadi *core society*. Untuk itu, pengaruh-pengaruh kebahasaan Eropa didorong secara sadar oleh mereka demi kepentingan mereka dengan *core society*. Itu sebabnya, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, masyarakat Hitu dapat menyadari dengan baik kosakata yang dipinjam dari bahasa Portugis dan Belanda sementara tidak untuk bahasa asing lainnya.

Skutnabb dan Kangas (2000) dalam melihat peran identik bahasa, beranggapan bahwa bahasa memainkan peran instrumental di tengah masyarakat; dapat dipelajari serta digunakan ketika dibutuhkan. Bahasa Hitu, Melayu, Melayu Ambon, Belanda dan Portugis dalam lisan maupun teks mengambil

---

(Westport: Greenwood Publishing Group, 1985): 83.

25. Sarup, *Identity, Culture and the Postmodern World*, 28.

Tabel 1

Pre-1400	Exchange of cloves and nutmeg for cloth and other commodities carried out by Asian traders in Maluku for centuries.
1401	City of Malacca founded which became the centre of Southeast Asian commerce. Malay spoken as the lingua franca.
1460	Islam to Ternate and Banda. Under sultans' influence, Islam soon spread to Hoamoal on Seram and north coast of Ambon.
<b>1500</b>	
1511	Portuguese gained control of Malacca.
1512	Portuguese fleet sailed to Banda.
1524	Permanent Portuguese residence built on Hitu, Ambon. Uli Siwa villages desired Portuguese protection against Ternate and Hitu.
1546	Xavier visited Ambon when Uli Siwa villages accepted Christianity.
1547	Jesus mission to Maluku began, administered from Goa via Malacca. Jesuits noted widespread use of Malay in Maluku, and used it in their work.
1575	Portuguese fort at Ternate surrendered to Sultan. <i>Casados</i> and their families fled to Ambon.
1576	Portuguese fort, <i>Nossa Senhora da Anunciada</i> , built in Amboina. Continuous native warfare in the area, Uli Lima vs Uli Siwa.
<b>1600</b>	
1605	Dutch (VOC) took Ambon fort and sought monopoly on spice trade.
1607	First Dutch schoolmaster, Johannes Wogma, to Ambon.
1624	Six schools in Ambon and Lease and 18 'lesser' schools. Attempts at education in Dutch language unsuccessful. Education mostly in Malay.
1689	Malay on Ambon noted as 'deficient'. Decision made by VOC to introduce High Malay in Ambon. Numerous reports of unintelligibility between the two varieties of Malay.
<b>1700</b>	
1733	Leydekker's translation of Bible in High Malay published. 'Literary' Malay used in sermons but poorly understood.
1796	English gained control of Ambon.
<b>1800</b>	
1803	Dutch resumed control in Ambon.
1810	English again in control.
1817	Dutch control of Ambon; now Dutch colonial government.
1850	Language shift: AM spoken as the first language in many Christian villages by the mid 1800s.
1869	Official recognition of Ambonese 'Citizens' school for upper-class Ambonese, taught by Dutch teachers in Dutch.
1871	<i>Fundamental Education Decree</i> : government schools were to provide education for children of all religions. SM vs AM debate among missionaries and educators. Translations and educational books printed in AM by Roskott.
<b>1900</b>	
1914	Native Dutch (' <i>Hollandsch-Inlandsche</i> ') schools started throughout the Dutch East Indies.
1943	Japanese in control. Japanese taught in all government schools. Use of Dutch forbidden, and use of Malay encouraged.
1945	Republic of Indonesia (RI) declared, BI as the national language.
1950	RI Department of Education in charge of schools. BI used as language of education and government.

tempatnya masing-masing di tengah kehidupan masyarakat Hitu.<sup>26</sup> Bahasa Hitu seringkali dipakai sebagai upaya mereka mempertahankan diri dan melawan di saat yang dibutuhkan ketika bahasa Hitu tidak dimengerti di luar komunitas Hitu. Bahasa Melayu Ambon digunakan demi kepentingan interaksi dengan komunitas yang lebih luas di kawasan. Bahasa-bahasa asing lainnya yang terdapat dalam teks sejarah, catatan perjalanan terdahulu dan surat-surat resmi kolonial—cukup banyak diarsipkan secara acak oleh para tokoh adat di Hitu—adalah artefak penting untuk mengenali dan memahami peristiwa

di masa lampau. Pada kasus terakhir ini, kemampuan untuk berbahasa asing menjadi tidak diperlukan pasca-kemerdekaan Indonesia. Teks-teks lama itu terlanjur dianggap sebagai upaya pemerintah kolonial untuk menghancurkan Hitu.

Sementara itu, naskah-naskah keagamaan dan sejarah yang menggunakan aksara Jawi tidak lagi ditelusuri—saya curiga bahwa upaya menutup sumber lokal ini telah dilakukan sejak penjajah menginjakkan kaki di Tanah Hitu, sebagai upaya proteksi mereka atas budaya, tradisi, dan pemerintahan lokal mereka. Namun,

26. Grimes (1991) merangkum linimasa kebijakan bahasa di Ambon oleh pemerintah kolonial dari waktu ke waktu. Rangkuman Grimes dapat merunut pemahaman atas perubahan penggunaan bahasa masyarakat Ambon dari waktu ke waktu (lihat Tabel 1).

hal itu berimbas sampai saat ini saat situasinya menjadi lebih terbuka untuk mengakses kembali teks-teks tersebut. Hal ini menyebabkan menurunnya kemampuan dari generasi ke generasi dalam memahami teks lama yang disimpan di rumah-rumah pusaka. Ketiadaan situasi berkebutuhan untuk memahami teks lama berbahasa asing dan bahasa Melayu itulah yang pada akhirnya membuat mereka meninggalkan karakter lama mereka sebagai masyarakat multilingual.

Pada taraf ini, relasi antara penggunaan dan kemampuan berbahasa dengan identitas sosial masyarakat berada pada upaya mempertahankan kelangsungan "*inherited, singular springs of their identity*". Keberagaman bahasa yang digunakan dan yang memengaruhi bahasa lokal adalah hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini dikarenakan keinginan manusia untuk membagikan klaim-klaim linguistik khusus pada dunia, menciptakan perspektif khusus atas realita di sekitar mereka, dan melindungi perbedaan kelompok: dalam arti, melindungi tujuan penting dari kebudayaan dan tradisi mereka.<sup>27</sup>

### *The Melting Pot*

Saat ini, Hitu—mencakup desa Hitu Lama dan Hitu Messing—memiliki kurang lebih 18 ribu jiwa penduduk. Terdiri dari masyarakat adat yang terhimpun dalam struktur pemerintahan adat sebagai *Upu Aman Tau* atau masyarakat adat Hitu dan masyarakat pendatang yang berasal dari berbagai daerah, mayoritasnya berasal dari Sulawesi Tenggara. Para pendatang mendiami tanah ulayat dan tanah datu milik desa Hitu di kurang lebih

enam dusun. Keenam dusun tersebut bernaung di bawah dua pemerintahan administrasi antara Hitu Lama dan Hitu Messing. Masyarakat Hitu—menilik bagaimana proses peleburan berbagai kelompok etnis di masa lalu membentuk struktur masyarakat adat Hitu—telah menunjukkan asal-muasalnya yang beragam, yaitu datang dari banyak wilayah di luar Hitu.

Terdapat ungkapan di masyarakat Hitu ketika menanggapi persoalan siapa yang paling awal mencapai Tanah Hitu dan membangun perkampungan, "*Seng pernah ada masyarakat asli di Hitu. Samua itu pendatang, datang dari luar Hitu.*" Ungkapan itu kurang lebih menunjukkan bahwa tidak ada yang benar-benar berasal dari Pulau Ambon dan mendiami pulau itu sejak lama. Hal ini didukung dengan legenda di tengah masyarakat Hitu yang menganggap bahwa Pulau Ambon pada mulanya tidak pernah ada. Bahwa nenek moyang yang masyarakat percayai sebagai pendatang pertama di Tanah Hitu merupakan tokoh yang berhasil 'menciptakan' Pulau Ambon. Tokoh yang bergelar *Yasirullah* itu, menurut tuturan masyarakat, berdoa kepada Tuhan demi timbulnya sebuah pulau dari dasar laut. Kemudian muncullah Pulau Ambon saat ini yang masyarakat Hitu sebut dalam bahasa lokalnya sebagai *Nusa Hitu* atau Pulau Hitu. Legenda itu dinamakan *Huseka'a* atau proses munculnya sebuah pulau dari dasar laut. Lokasi yang diyakini sebagai awal mula munculnya pulau itu kemudian yang menjadi lokasi pelabuhan Hitu sejak awal berdirinya sampai dengan hari ini.<sup>28</sup>

Dari abad ke-16 sampai dengan

27. John Edwards, *Language and Identity* (New York, Cambridge University Press, 2009): 53.

28. Penjelasan ini sudah cukup umum di tengah masyarakat Hitu. Data ini dihimpun dengan mewawancarai Abdul Fikri Pelu, berasal

18, Hitu telah didiami oleh beberapa komunitas etnis dari luar Maluku yang berasal dari Arab, Cina, Gujarat, dan Persia. Berbagai bukti kehadiran bangsa asing di Hitu dapat ditemui dalam pengaruh bahasa, kuliner, dan bukti arkeologis seperti porselen dan lain sebagainya. Terdapat bekas setelmen Etnis Cina di daerah sekitar Pelabuhan Hitu, masyarakat mengenalnya sebagai Kampung Cina. Sementara itu, pengaruh-pengaruh lain berakulturasi dalam bentuk kudapan lokal. Bahkan kudapan yang berasal dari luar Hitu menjadi kudapan wajib ketika acara-acara besar digelar di desa seperti *tahlilan*, *duduk meja*, prosesi pengangkatan jabatan adat, dan lain sebagainya.

Hitu telah menjadi 'mangkuk' di kawasan yang menampung begitu banyak pendatang dari berbagai daerah sebelum kedatangan bangsa Eropa. Atribut-atribut kebudayaan yang hadir saat ini di tengah masyarakat Hitu merupakan hasil konstruksi panjang dari berbagai peristiwa sejarah di masa lampau. Kehadiran atribut-atribut tersebut telah mempertegas sifat inklusif masyarakat Hitu. Selama peradaban Hitu berdiri kokoh, tertatih dan terus berusaha membangkitkan kembali kejayaannya hingga saat ini. Hitu telah dibentuk oleh berbagai peristiwa di masa lampau, mencakup proses pembentukan otoritas mereka di kawasan, kontak dagang dengan bangsa asing, dan persoalan-persoalan yang muncul pasca kekuasaan kolonial di Maluku. Inilah sebuah tawaran untuk mendefinisikan masyarakat Hitu sebagai masyarakat yang menerima begitu

banyak pengaruh dari luar.

Melihat Hitu sebagaimana kita melihat Maluku secara umum sebagai bagian dari ras Melanesia boleh jadi akan membawa kita pada kegagalan memahami kompleksitas persoalan identitas yang menyeret mereka ke dalam berbagai persoalan. Kita perlu melihat secara menyeluruh dan serius perihal atribut-atribut kebudayaan yang terpasang pada masyarakat Hitu. Kita dapat melandasinya pada persoalan bahasa yang telah kita diskusikan dalam bab ini. Meskipun bahasa Hitu merupakan salah satu dari rumpun bahasa Malayo-Polinesia sekaligus representasi atas kebudayaan Melanesia, bahasa Hitu secara terbuka menyerap dan meminjam berbagai bahasa asing. Hal tersebut menunjukkan penegasan atas posisinya terhadap perkembangan kebudayaan dari zaman ke zaman—meskipun proses penerimaan itu tidak sepenuhnya disadari dan dipandang sebagai bagian dari strategi mereka membangun konstruksi atas dirinya menghadapi perkembangan zaman.

### **Orang Hitu Hari Ini dan Konflik Identitas**

Pada pertengahan 2018, Raja Hitu Lama mengeluarkan kebijakan penggunaan bahasa Hitu dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Raja Hitu Lama beralasan bahwa tingkat penggunaan bahasa Hitu di tengah generasi muda sangatlah minim. Ia berpendapat, "*Tasa bahasa, tasa adat.*" Jika hilang bahasa maka hilang sudah adat-istiadat.<sup>29</sup> Meskipun sampai dengan penelitian ini selesai dilakukan tidak ada dampak signifikan

---

dari keluarga mata rumah Pelu Maulana (Hatala'a), 2 Agustus 2019.

29. Saya berkesempatan mengikuti dialog bersama komunitas Hikayat Tanah Hitu dengan raja Hitu Lama, 19 Juli 2019. Penjelasan mengenai hilangnya bahasa, maka hilang juga adat istiadat, disampaikan dalam dialog tersebut

perihal pemberdayaan dan pelestarian bahasa Hitu di tengah kaum muda. Lewat kebijakan tersebut, ia telah mengekspresikan kekhawatiran di atas.

**Raja Hitu Lama:** Beta sampaikan untuk semuanya (pemuda dan masyarakat luas) bahwa bahasa Hitu itu penting. Jadi, pelestarian budaya dan adat-istiadat, pentingnya kita dahulukan pelestarian dan penggunaan bahasa Hitu secara aktif. Beta seng ingin negeri (Hitu) ini hilang bahasanya, budayanya, adat-istiadatnya. Tasa' bahasa, tasa' adat. Semua proses adat kan menggunakan bahasa Hitu.<sup>30</sup>

Penggunaan bahasa daerah di tengah pemuda Hitu memang tidak begitu baik. Dari pengamatan pada gaya berbahasa pemuda di Hitu, mereka cenderung berupaya untuk mengekspresikan dialek 'kota' yang mereka dapat dari interaksi mereka dengan orang-orang yang berasal dari Kota Ambon. Hal tersebut juga tercermin dalam gaya hidup, gaya berpakaian dan soal imajinasi atas lingkungan seperti apa yang semestinya ada pada mereka. 'Kebutuhan untuk ada bersama' tidak lagi mengacu pada atribut yang melengkapi lingkungan mereka di Hitu. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan dan intensitas mereka berinteraksi dengan masyarakat Kota Ambon. Berbeda dengan pemuda yang secara ekonomi dan sosial cenderung bergantung pada lingkungan lokal Hitu, mereka yang belajar dan bekerja di luar Hitu lebih banyak

mengekspresikan—baik secara spontan maupun tidak—atribut dan karakter pemuda Kota Ambon.

Tentu saja, kita tidak dapat membatasi pola tersebut. Individu tidak dapat mengontrol dan menyadari perubahan atas kebudayaan dan nilai serta kebiasaan-kebiasaannya. Untuk itu, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa, berkaitan dengan bahasa, budaya dan adat-istiadat, merupakan salah satu upaya penting untuk membentuk kembali identitas Hitu yang diinginkan dan yang dianggap telah ditinggalkan. Di sisi lain, kita perlu menyadari bahwa ketergantungan kita pada lingkungan tertentu secara ekonomi, sosial dan politik merupakan unsur penting dalam membentuk "siapa diri kita". Hal ini juga yang sudah lebih dulu ditulis oleh Ridjali dalam catatannya. Kita dapat melihat bagaimana struktur awal masyarakat Hitu terbentuk lewat upaya mencari kesepakatan di antara berbagai perbedaan di antara mereka.

Ditambah lagi, keberadaan kepentingan ekonomi dan politik dari berbagai pihak lokal maupun kolonial di kawasan. Perjumpaan berabad-abad lalu tersebut tersimpan dalam memori kejayaan<sup>31</sup> dan keterpurukan yang terus dilestarikan dalam obrolan-obrolan lepas sore hari di bandar tua yang dahulu menyambut banyak pelayar.

'Kita hari ini' adalah 'orang-orang kalah' dan 'terpinggirkan' yang mencoba membangun kembali

30. Dialog dengan Raja Hitu Lama bersama komunitas Hikayat Tanah Hitu, 19 Juli 2019.

31. Apa yang dimaksud sebagai 'kejayaan' pada masyarakat Hitu mengacu pada ungkapan romantik mereka ketika mengenang kembali sejarah di masa lampau; tentang kedatangan para leluhur dari berbagai penjuru dunia, keberhasilan membangun persekutuan di Tanah Hitu dan keberhasilan mengusir Portugis dari Tanah Hitu. Selanjutnya, masyarakat Hitu menganggap diri mereka sebagai pewaris langsung 'kejayaan' persekutuan yang membentang dari ujung timur sampai barat Pulau Ambon itu. Mereka juga akan membandingkan capaian masa lampau mereka dengan capaian tetangga-tetangga mereka seperti masyarakat Hatuhaha di Pulau Haruku, Iha di Saparua dan Huamual di Seram Bagian Barat.

kekuatannya namun selalu gagal dan pada akhirnya hanya dapat menyimpan memori 'kejayaan' itu sebagai barang dagangan di tengah obrolan dengan sesama mereka. 'Kita hari ini' adalah pewaris tunggal dari jejak-jejak masa lampau; tentang penemuan sebuah pulau, tentang pertemuan dan interaksi global dan tentang keberhasilan sebuah persekutuan. Namun, 'kita esok hari' adalah bayangan kelabu yang tidak kunjung dapat kita lihat kemana cahayanya. 'Kita esok hari' boleh jadi akan terus mencari medan pertempuran untuk kembali meraih supremasi identitasnya. Demi sebuah pengukuhan diri atas 'yang awal dari yang paling awal' dan 'sang penguasa dan dialah satu-satunya penguasa'<sup>32</sup> di Pulau Ambon dari 'yang mewarisi' warisan supremasi identitas mereka yang direbut oleh bangsa Eropa ratusan tahun lalu.

Mengacu pada Henri Tajfel *Social Identity Theory* (SIT), individu dan kelompok memiliki identitas-identitas sosial yang mendorong kepercayaan diri dan persatuan mereka terhadap kelompok lain.<sup>33</sup> Dalam beberapa kesempatan, konflik sosial yang melibatkan masyarakat Hitu dengan kelompok lain di Pulau Ambon menunjukkan perbedaan-perbedaannya dengan kelompok lain dan berusaha mempertahankan supremasi identitasnya sebagai orang Hitu dengan keharusan keluar sebagai 'juara' dalam konflik tersebut. Devos dan Loan Vu

melihat bahwa individu tidak dapat mengontrol atau tidak seharusnya sadar akan dampak yang dimiliki dari pandangannya atas kebudayaan dan pengalamannya atas diri, nilai-nilai, sikap, dan kebiasaan-kebiasaan.<sup>34</sup>

Kabupaten Maluku Tengah memiliki tiga kecamatan yang berada di dataran Pulau Ambon, terdiri atas; Salahutu, Leihitu dan Leihitu Barat. Dari ketiga kecamatan tersebut terdapat dua puluh dua desa adat. Desa adat tersebut merupakan warisan dari pecahnya persekutuan Hitu yang disebut sebagai *Uli Hitu* atau *Uli Halawan* yang artinya persekutuan emas. Melalui Perda Provinsi Maluku No. 32/2004 kemudian diteruskan lewat Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 1/2006, desa-desa adat itu dikukuhkan sebagai daerah berbasis hukum adat yang dapat mengatur pemerintahannya sesuai aturan adat istiadat dan budaya lokal yang berlaku. Raja-raja di desa adat tidak hanya memangku jabatan adat saja, tetapi juga jabatan administrasi sebagai kepala desa.<sup>35</sup>

Meskipun telah membawa dampak baik berupa pengamanan tanah ulayat, pembentukan *negeri* berbasis penetapan hukum adat yang disahkan oleh Perda memicu berbagai masalah. Konflik antar-*negeri* di Kec. Salahutu, Leihitu dan Leihitu Barat langgeng bertahan hingga hari ini. Konflik terakhir pada 2017 yang melibatkan Desa Hitu dan Wakal merenggut empat

32. Mengacu pada gelar raja Hitu, *Upu Latu Sitania* yang berarti "Ialah yang mulia penguasa satu-satunya Nusa Hitu"

33. Henri Tajfel, *Human Groups and Social Categories: Studies in Social Psychology* (Cambridge University Press, 1981); lihat juga Marilynn B. Brewer dan Wendi Gardner, "Who Is This 'We'? Levels of Collective Identity and Self-Representations," *Journal of Personality and Social Psychology* 71 (1996): 83—93.

34. Devos dan Loan Vu, "Implicit Multicultural Identities," 229.

35. Tri Ratnawati, "Demokratisasi atau Kembalinya Feodalisme Lokal: Tinjauan Terhadap Perda Kabupaten Maluku Tengah No.1 Tahun 2006 tentang Negeri," *Maluku Dalam Catatan Seorang Peneliti* (Jakarta: Pustaka Pelajar): 142—144.

korban jiwa.<sup>36</sup> Sedangkan pada 2016, Desa Seith dan Negeri Lima terlibat bentrok di perbatasan kedua desa yang mengakibatkan belasan rumah terbakar dan lima orang tewas.<sup>37</sup> Narasi umum yang sering muncul perihal konflik antar-*negeri* adalah persoalan minuman keras yang memicu perkelahian pemuda. Padahal, dari data hasil wawancara dengan pemuda di Hitu,<sup>38</sup> sentimen terhadap *negeri* tetangga lebih menunjukkan sentimen kesejarahan dan identitas ketimbang persoalan solidaritas perkelahian semata.

Di tengah kalangan pemuda Hitu, ekspresi maskulinitas cenderung ditonjolkan di tengah aktivitas umum. Sebagai contoh, jika salah seorang warga *negeri* A berjalan melintas di wilayah *negeri* B dengan gaya yang perlente maka warga dari *negeri* A tersebut telah dianggap menunjukkan ekspresi maskulinitasnya. Hal ini tidak dapat diterima oleh warga *negeri* B yang akan mengeluarkan sekian banyak alasan—utamanya alasan perihal narasi sejarah—yang menunjukkan bahwa warga *negeri* B lebih hebat. Keberanian dan maskulinitas tersebut mengacu pada sejarah lisan yang mereka ketahui tentang pembentukan *negeri*, kisah kepahlawanan para *kapitan* (panglima perang) yang berasal dari *negeri* B dan lain sebagainya.<sup>39</sup>

Teori Marilynn B. Brewer lebih lanjut menjelaskan perihal proses pengidentifikasian sosial. Teori tersebut menyatakan bahwa individu memiliki dua kebutuhan penting: (1) kebutuhan akan asimilasi dan inklusi (kebutuhan akan kepemilikan yang dapat membentuk individu menjadi bagian dari kelompok) dan (2) kebutuhan akan pembedaan diri dengan orang lain (berlawanan sikap dengan kebutuhan akan asimilasi pada sebuah kelompok). Kebutuhan individu yang saling bertentangan tersebut diredakan oleh keanggotaan dalam sebuah kelompok identitas sosial (kebutuhan akan inklusi dan kepemilikan) yang membedakan dirinya sendiri dari kelompok-kelompok lain (kebutuhan akan membedakan diri dari kelompok luar).<sup>40</sup> Ekspresi maskulinitas yang ditonjolkan oleh berbagai kelompok masyarakat di Leihitu berada dalam posisi yang setara. Artinya, citra maskulin 'diperebutkan' oleh setiap individu dari setiap kelompok guna menstandarisasi dirinya pada standar kelompok. Ketika individu dalam kelompok dapat dilihat maskulin, maka 'perebutan' berada pada taraf 'individu dari kelompok mana yang lebih maskulin.'

Dalam skala konflik yang lebih besar, seperti Konflik Ambon 1999,

36. Rahman Patty, "Gubernur Maluku Minta Insiden Wakal-Hitu Diproses Hukum," *Kompas*, 27 Juni 2017. <https://regional.kompas.com/read/2017/06/27/07483811/gubernur.maluku.minta.insiden.wakal-hitu.diproses.hukum>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2019.

37. Jimmy Ayal, "Lima Orang Meninggal dalam Bentrokan Warga Desa Seith vs Negeri Lima," *Antara News*, 1 Agustus 2014. <https://www.antaraneews.com/berita/446506/lima-orang-meninggal-dalam-bentrokan-warga-desa-seith-vs-negeri-lima>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2019.

38. Wawancara dilakukan terhadap lebih dari lima belas pemuda dengan rentang usia antara 15 sampai dengan 20 tahun.

39. Lihat Bab 3, "Konstruksi Imaji Gaya dan Kuasa Tubuh," dan Bab 4, "Makna Gaya Tubuh di Ruang Publik" dalam Hatib Abdul Kadir, *Bergaya di Kota Konflik* untuk memahami lebih lanjut bagaimana gesekan identitas antar kelompok pemuda di Ambon diekspresikan lewat gaya dan tubuh di ruang-ruang public.

40. Brewer, "The Social Psychology of Intergroup Relations: Can Research Inform Practice?" *Journal of Social Issues* 53 (1997): 203—204; Brewer, "Ingroup Identification and Intergroup Conflict: When Does Ingroup Love Become Outgroup Hate?" dalam *Social Identity, Intergroup Conflict, and Conflict Reduction*, ed. Richard D. Ashmore, Lee Jussim, dan David Wilder (Oxford: Oxford University Press, 2001), 21—22.

komunitas Muslim dan Kristen di Ambon turut melibatkan masyarakat Leihitu sebagai salah satu aktornya. Mayoritas penduduk semenanjung Leihitu merupakan pemeluk agama Islam. Dalam kontestasi Konflik Ambon 1999, kekuatan massa Leihitu menjadi penyeimbang kekuatan komunitas Kristen di Kota Ambon—medan perang utama dalam Konflik Ambon 1999—yang sebagian besar berada di Semenanjung Leitumur. Dalam Konflik Ambon 1999, selain persinggungan identitas maskulin yang menonjol, distingsi identitas sosial masyarakat Kristen dan Muslim Ambon menemui medannya. Setelah berabad-abad, konstruksi sosial-budaya yang dialami kedua kelompok tersebut berkembang di lapangan dan pada subjek yang berbeda. Kelompok Kristen berada pada lapangan dan subjek kolonial, sementara kelompok Muslim berada pada lapangan kolonial namun berupaya keluar dari kungkungan tersebut.

Pemuda di desa Hitu dapat mengingat kisah 'heroik' yang dilakukan oleh orang tua mereka pada Konflik Ambon 1999. Kelompok massa dari Leihitu berhasil merangsek masuk ke medan pertempuran di Kota Ambon setelah berhasil menyerang Dusun Benteng Karang, Desa Hunut, Nania, Poka, dan Rumahtiga. Kisah-kisah tersebut diwarisi secara turun-temurun melalui obrolan-obrolan lepas di pelabuhan, pos ronda, dan tempat-tempat tongkrongan anak muda Hitu lainnya.

**Rahman:** Pasukan Hitu keluar ke medan perang di Kota Ambon setelah mendapatkan informasi bahwa Masjid Raya Al Fatah terbakar, padahal berita

tersebut tidak benar. Raja mengutus secara adat dua belas relawan ke medan pertempuran dan ditempatkan di berbagai pos. Ketika orang Hitu datang, semua menyambut bak kedatangan pahlawan tangguh. Pasukan Kristen pun tampak segan. Dulu, ada instruksi dari pihak sebelah (kelompok Kristen) bahwa membawa orang Hitu, hidup atau mati, akan diberikan imbalan.<sup>41</sup>

**Mahmut:** Dulu, beta punya om cerita bahwa beliau datang ke medan pertempuran dan massa segera membuka jalan seolah mempersilahkan beliau dan orang Hitu lainnya untuk memimpin peperangan. Saking hebatnya waktu itu, hampir semua orang mengenal dan bersikap baik kepada orang Hitu.<sup>42</sup>

Di luar kisah-kisah tersebut, hal ini menunjukkan betapa memori perihal konflik sosial tersebut dengan mudahnya diwarisi dari generasi ke generasi. Kisah-kisah tersebut di tengah pemuda Hitu seakan telah menjadi kisah wajib. Kisah serupa setidaknya dapat dituturkan oleh sebagian besar pemuda Hitu.

Kisah-kisah tersebut telah menjadi memori publik di tengah masyarakat Hitu. Memori diidentifikasi bersifat publik atau kolektif dibentuk tidak hanya oleh apa yang orang ingat atas pengalaman pribadinya saja, tetapi juga oleh sebuah konstruksi masa lampau, seperti yang dijelaskan oleh Barbara Misztal sebagai "*culture's active meaning-making*." Dalam pandangan Misztal, memori personal untuk dijadikan bagian dari sebuah fenomena kolektif yang lebih luas, pengalaman pribadi selalu diubah rupanya dan selalu 'lebih dari' sekadar pengalaman pribadi. Memori publik mengacu pada sebuah masa lalu yang

41. Wawancara dengan Rahman Pelu, 20 Juli 2019.

42. Wawancara dengan Mahmut Waulat, 20 Juli 2019.

dibagikan secara umum dan diperingati secara kolektif.<sup>43</sup>

Memori publik terhadap Konflik Ambon 1999 merupakan ekspresi atas 'kemenangan' Muslim Hitu merebut kembali kejayaannya dari saudara Leitimur di selatan. Sejak pemerintahan kolonial, melalui diskriminasi kebijakan yang dibuat oleh VOC<sup>44</sup>, Muslim Hitu tidak pernah meraih kejayaannya kembali. Di ranah birokrasi<sup>45</sup>, hanya ada satu nama yang berasal dari Leihitu yang pernah menduduki jabatan sebagai Walikota Ambon, begitu pula yang terjadi di Kabupaten Maluku Tengah. Pada akhirnya, Konflik Ambon 1999 perlu diperingati terus menerus melalui tuturan kisah-kisah 'heroik' dari generasi ke generasi.

Demi melegitimasi supremasi identitasnya, orang-orang Hitu perlu mencari 'objek' lain untuk menunjukkan 'keagungan' dirinya. Misalnya, pemuda Hitu seringkali mengeluarkan ungkapan "*sama deng orang Seram balakang-balakang* (pedalaman)" atau "*kayak orang Buton sah* (seperti orang Buton saja)" kepada seseorang yang mereka anggap cukup aneh dan janggal dalam berpakaian dan berperilaku. Sederhananya, ungkapan tersebut merupakan ejekan untuk memberikan label 'kampungan' terhadap kelompok tertentu. Ungkapan tersebut sering ditujukan kepada masyarakat dusun yang mendiami tanah ulayat Hitu dan juga masyarakat dari Pulau Seram. Secara bersamaan, masyarakat Hitu mengekspresikan pelarian atas

ketidakberdayaan mereka menghadapi 'kota' sekaligus memberikan label pada diri sendiri sebagai masyarakat 'modern'—yang tidak kalah hebat dari masyarakat kota pada umumnya—di hadapan orang lain yang mereka anggap 'kuno' dan 'ketinggalan zaman'.

Saat ini, sebagian besar masyarakat Hitu menggantungkan hidupnya secara langsung maupun tidak langsung kepada Kota Ambon. Mereka berprofesi sebagai pegawai pemerintahan, buruh, sopir angkutan, tukang ojek, dan lain-lain. Selain itu, hasil alam seperti cengkeh, pala, buah-buahan, dan ikan juga didistribusikan ke kota. Hitu menjadi salah satu daerah penyuplai kebutuhan di kota. Sebagian orang Hitu yang memandang Kota Ambon saat ini sebagai bagian dari wilayahnya telah gugur dan hanya menjadi memori sejarah semata. Faktanya, masyarakat Hitu perlu bertarung di kota untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, juga bertarung untuk kebanggannya—supremasi identitasnya—lewat banyak cara, tidak jarang lewat kontak fisik dengan kelompok lain.

### Dapatkan Kita Merencanakan secara Sadar Identitas Kita Esok Hari?

Beberapa pemuda Hitu menganggap bahwa mereka tetap perlu menjadi kader *negeri* yang cemerlang di luar desa. Namun, mereka menganggap bahwa identitas, supremasi identitas, dan memori kejayaan masa lampau

43. Barbara A. Misztal, *Theories of Social Remembering* (London: Open University Press, 2003): 13.

44. Lihat Knaap, Gerrit. "The Demography of Ambon in the Seventeenth Century: Evidence from Colonial Proto-Censuses." *Journal of Southeast Asian Studies* 26, 2 (1995): 227-41. <http://www.jstor.org/stable/20071716>.

45. Hal ini mengacu pada hasil penelitian lapangan di mana sebagian besar pemuda Hitu seringkali membicarakan berapa jumlah perwakilan parlemen yang berasal dari desa Hitu. Hal ini juga telah menjadi acuan bagi mereka untuk melihat seberapa hebat mereka merebut suara publik yang pada akhirnya akan dianggap sebagai representasi dari supremasi identitas mereka sebagai orang Hitu secara luas.

telah menjadi salah satu faktor yang menghambat proses perkembangan pemuda di desa.

**Hamdan:** Beta pikir pendidikan mestinya jadi jalan keluar. Biar kalau mau maju ya jangan lewat baku-pukul yang tidak jelas siapa menang, siapa kalah. Lebih baik bangun desa dengan tanggap melihat masalah apa yang sedang terjadi dan cari solusinya. Beta cukup risih ketika membicarakan apa saja dengan pemuda Hitu selalu menyinggung kejayaan masa lalu. Mereka seloah merasa cukup atas segala-galanya.<sup>46</sup>

**Aldo:** Kejayaan masa lampau itu semestinya tidak lagi jadi acuan untuk kita melangkah ke depan. Ada banyak hal untuk menunjukkan kalau kita adalah generasi pewaris kejayaan itu. Bisa lewat berjuang untuk dapat kuliah di kampus terbaik atau mendapatkan pekerjaan yang layak.<sup>47</sup>

Sebetulnya, pemerintah adat telah ikut melegitimasi supremasi identitas masa lampau itu lewat sikap dan posisinya yang seolah dapat menyelesaikan semua persoalan yang dihadapi oleh desa dan masyarakat dengan mudah. Pemerintah adat yang merangkap pemerintah desa tidak dapat menyesuaikan dirinya dengan perkembangan zaman dan masih memakai cara-cara lama dalam menjalankan pemerintahannya. Padahal, institusi adat telah diberikan kewenangan secara luas untuk mengelola pemerintahannya sendiri, sesuai dengan aturan adat-istiadat yang berlaku di tempatnya melalui penetapan Perda

Provinsi Maluku dan Perda Kabupaten Maluku Tengah.

Penetapan Perda Provinsi Maluku No. 32/2004 dan Perda Kabupaten Maluku Tengah No.1/2006 sebagai legitimasi atas eksistensi pemerintahan adat telah menimbulkan pertanyaan. Apakah Perda tersebut mendukung demokratisasi Indonesia atau justru kembali pada feodalisme di masa lampau?<sup>48</sup> Pemilihan raja ditetapkan lewat pola pemilihan adat yang didasari pada garis keturunan. Sederhananya, marga atau fam raja akan melahirkan kembali seorang raja. Abdul Gaffar Karim (2018) dalam penelitiannya perihal relasi antarunsur di tengah masyarakat Ambon yang mendukung kontestasi politik, melihat bahwa karakter sebuah rezim lokal sangat ditentukan oleh proses sejarah yang membentuknya serta tantangan masa kini yang menghadangnya.<sup>49</sup> Lembaga adat memiliki prosedur panjang yang demokratis dalam menentukan kebijakan pemerintahannya. Raja sebagai representasi lembaga adat di Ambon berada pada posisi yang samar-samar antara negara dan masyarakat sipil. Di masa lalu, raja adalah struktur yang menjalankan fungsi pemerintahan sekaligus menjaga nilai-nilai adat di masyarakat. Namun di masa modern, raja lebih banyak menaikan peran adat dengan sedikit peran administratif. Seiring dengan bergesernya keputusan politik ke pemerintahan kabupaten/kota, para raja sering dipandang sebagai tokoh

46. Wawancara dengan Hamdan Tuarita, 20 Juli 2019.

47. Wawancara dengan Aldo As'ad Pelu, 20 Juli 2019.

48. Tri Ratnawati, "Demokratisasi atau Kembalinya Feodalisme Lokal: Tinjauan Terhadap Perda Kabupaten Maluku Tengah No.1 Tahun 2006 tentang Negeri," *Maluku Dalam Catatan Seorang Peneliti* (Jakarta: Pustaka Pelajar).

49. Abdul Gaffar Karim, "Ambon: Rezim Plural-Kompromis," dalam *Rezim Lokal di Indonesia: Memaknai Ulang Demokrasi Kita*, ed. Longgina Novadona Bayo dkk., 312.

yang paling dekat dengan masyarakat untuk menjalankan kebijakan pemerintah.<sup>50</sup> Namun, kenyataannya justru terbalik.

Raja di masa kini dapat mengambil posisi penting dalam urusan mendukung elektabilitas salah seorang kandidat parlemen, entah berasal dari Hitu sendiri atau berasal dari desa lain. Dalam dialog bersama Raja Hitu Lama, ia memberikan contoh bahwa urusan-urusan pengembangan desa dan lain sebagainya dapat dilakukan dengan mudah. Caranya adalah dengan melakukan kontrak politik dengan calon-calon parlemen tertentu.<sup>51</sup> Sementara itu, dalam posisi dan perannya sebagai petinggi adat di Desa Hitu, raja memainkan peran sebagai raja yang mendapatkan legitimasi dan kekuasaan semi-absolut. Sebetulnya, raja memiliki Dewan Saniri yang berisi berbagai kepala marga. Dewan tersebut berfungsi untuk membantu raja dalam merumuskan dan mengelola kebijakan pemerintahan adat nantinya. Untuk pemerintahan desa, raja membentuk staf *negeri* yang ia tunjuk untuk mendampingi pemerintahannya.

Sebetulnya, ini merupakan wajah pemerintahan lama. Otoritas Hitu kehilangan pengaruhnya secara politik dan ekonomi semenjak dipindahkannya pelabuhan ke pantai Honipopu. Hitu, dari waktu ke waktu, berpindah 'tuan' dari Portugis hingga Republik sehingga raja dan para wakil adat lainnya merasa bergantung dengan otoritas yang lebih tinggi, yakni bupati, gubernur, dan lainnya. Raja sangat sedikit berlaku sebagai representasi masyarakat adat, melainkan lebih mudah dilihat sebagai aparatus negara semata. Sebab, raja

acapkali gagal memahami dinamika sosial masyarakatnya dan cenderung menjadi subjek asing terhadap lingkungannya sendiri.

Saat penelitian ini berlangsung, saya mendapatkan kabar dari Ongen<sup>52</sup>—nama samaran— yang mengungkapkan bahwa peneliti dari salah satu universitas di Jepang hendak melakukan penelitian dan memerlukan data dari Raja Hitu Lama. Raja dengan alasan lelah atau sakit, menolak permintaan itu. Padahal, Ongen mengaku bahwa dirinya sangat bersemangat untuk memfasilitasi dialog dan proses pencarian data itu. Sikap raja yang demikian itu, menurut Ongen, telah menjadi bahan pergunjungan oleh sebagian pemuda Hitu. Beberapa pemuda menganggap, sikap seperti itu justru telah menyatakan ketidakterbukaan dan 'anti-kemajuan' yang direpresentasikan oleh raja itu sendiri. Sebagian pemuda lainnya menganggap bahwa raja sudah lebih dahulu tahu maksud kedatangan para peneliti itu dan hal tersebut sudah lebih dahulu dinilai akan membawa dampak buruk bagi *negeri* dan sejarah *negeri*.

Kita perlu memahami bahwa institusi adat yang merangkap peran administratif negara telah menjadi representasi tetap atas dinamika-dinamika kemasyarakatan yang terjadi di tengah orang-orang Hitu. Langkah dan kebijakan-kebijakan mereka yang menyangkut penyelesaian konflik, revitalisasi bahasa lokal, dan pelestarian budaya, menjadi tolok ukur akan menjadi seperti apa kita di esok hari. Sebab, semua yang keluar dari raja menjadi patokan ideal untuk seperti apa menjadi 'orang Hitu' itu.

50. Karim, "Ambon: Rezim Plural-Kompromis," 298—299.

51. Dialog dengan raja Hitu Lama, 19 Juli 2019.

52. Narasumber menolak untuk dicantumkan nama dan tanggal wawancara.

## Kesimpulan

Artikel ini mencoba mendorong pemahaman kita atas identitas hari ini dan peristiwa-peristiwa sejarah yang melatarbelakanginya. Kita tahu bahwa pemindahan pelabuhan oleh Portugis telah menciptakan 'pusat' dan 'pinggiran' baru—mengubah peta politik dan ekonomi di Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease. Dampaknya, kita terus mengidentifikasi diri kita dari waktu ke waktu sebagai 'orang-orang kalah' karena tidak dapat mengembalikan akses dan kontrol politik-ekonomi di kawasan Pulau Ambon.

Alih-alih ingin mengembalikan supremasi identitas kita di masa yang lalu, kita luput bahwa proses panjang pembentukan identitas yang tidak akan pernah selesai itu perlu dipahami sebaik-baiknya lewat penelusuran konteks historis. Sebab, sekalipun kita meyakinkan diri sebagai pewaris utuh kebudayaan Hitu dan segala latar belakang sejarah di baliknya, kita tidak dapat meringkus keseluruhan nilainya. Belum lagi, sebagai masyarakat adat yang memiliki pola dan cara hidupnya sendiri yang dinilai paling ideal untuk menopang kehidupan sosial dan membangun kesejahteraan ekonomi, kita harus bersinggungan dengan pihak lain. Pemerintah dan para korporat, misalnya, tentu mereka memiliki sudut pandang lain dalam melihat 'kehidupan ideal' sebuah masyarakat.

Dengan kata lain, kita perlu bersinggungan dengan berbagai kepentingan di luar kelompok yang terus mendesak. Sebagai warga negara Indonesia saja, misalnya, kita perlu membagi ruang demi kemajuan pembangunan yang didorong oleh pemerintah pusat saat ini. Sementara

itu, kita makin lemah dan kebingungan mengatur tanah ulayat sendiri. Belum lagi, kita justru sibuk dengan perseteruan yang seolah benar-benar murni persoalan siapa yang paling 'hebat' dan 'perkasa' di Pulau Ambon. Padahal, kita sedang melanggengkan ekspresi kekalahan dan ketertinggalan kita secara ekonomi dan politik di kawasan sehingga satu-satunya cara paling mudah adalah dengan melakukan konfrontasi fisik secara langsung dengan kelompok lainnya.

Perkembangan masyarakat Hitu sebagai masyarakat multikultur sebetulnya sudah berakhir. Kemungkinan internalisasi pengaruh baru yang datang dari para pendatang yang mendiami tanah ulayat Hitu saat ini ke dalam struktur adat isitadat hampir sepenuhnya tertutup. Akan tetapi, perlu disadari bahwa hal itu terus berlanjut dikarenakan tanah ulayat Hitu yang berdempetan dengan wilayah administrasi Kota Ambon akan terus digunakan demi kepentingan pembangunan dan pengembangan kota. Kita telah gagal dan tidak memahami bahwa segala sesuatu yang berdiri di tanah ulayat kita akan bersinggungan dan berdampak langsung pada kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Hitu. Alih-alih melepas tanah ulayat demi mendukung pembangunan perekonomian kawasan, kita luput bahwa kita tidak mendapatkan dampak signifikan apapun dari itu.

Institusi adat sebagai nahkoda yang mengatur ke mana kita akan berlayar perlu memahami perubahan zaman yang bergerak begitu cepat. Tanpa upaya untuk mengontekstualisasikan nilai-nilai adat istiadat dan kebudayaan Hitu dengan situasi dan kondisi zaman ini,

kita akan gagal dan terus tertinggal dalam berbagai urusan. Pelabuhan memang penting bagi kita di masa lalu. Hal itu juga yang membawa kita kepada kejayaan di masa lampau. Lantas, dengan mengacu pada keberhasilan kita memanfaatkan pelabuhan demi mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi serta supremasi identitas kita saat itu, dapatkah kita menjawab pertanyaan berikut ini: dengan siapa kita berdagang? Siapa yang memiliki otoritas untuk mengatur perdagangan? Bukankah pelabuhan yang berperan krusial itu berarti pasar?

Jika berhasil kita jawab, mari kita bertanya kembali. Dapatkah kita menjelaskan identitas kita, orang Hitu, dengan acuan lama? Atau apakah kita perlu merangkai ulang narasi kita atas 'siapa diri kita hari ini'? Apakah kita saat ini sedang melakukan berbagai penyesuaian demi keselarasan untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan politik kita esok hari?

### Daftar Pustaka

- Ashmore, Richard D., Lee Jussim, dan David Wilder (ed.). 2001. *Social Identity, Intergroup Conflict and Conflict Reduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Roem Topatimasang (ed.). 2016. *Orang-orang Kalah: Kisah Penyingkiran Masyarakat Adat di Kepulauan Maluku*. Yogyakarta: Insist Press.
- Anceaux, J. C. 1965. "Linguistic Theories About Austronesian Homeland." *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 417–432.
- Benet-Martinez, (ed.) Veronica, dan Ying-Yi Hong. 2014. *The Oxford Handbook of Multicultural Identity*. New York: Oxford University Press.
- Brewer. 1997. "The Social Psychology of Intergroup Relations: Can Research Inform Practice?" *Journal of Social Issues* 203–204.
- Brewer, Marilynn B., dan Wendi Gardner. 1996. "Who Is This 'We'? Levels of Collective Identity and Self-Representations." *Journal of Personality and Social Psychology* 83–93.
- Collins, James T. 2003. "Language death in Maluku the impact of the VOC." *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 247–289.
- Collins, James T. 1993. "Languages of Maluku: Introduction." *Oceanic Linguistics* 238–240.
- Devos, Thierry, dan Thuy Loan Vu. 2014. "Implicit Multicultural Identities." In *The Oxford Handbook of Multicultural Identity*, by (ed.) Veronica Benet-Martinez and Ying-Yi Hong, 227–251. New York: Oxford University Press.
- Edwards, John. 2009. *Language and Identity*. New York: Cambridge University Press.
- Freire, Paulo. 1985. *The Politics of Education: Culture, Power and Liberation*. Westport: Greenwood Publishing Group.
- Grimes, Barbara Dix. 1991. "The Development and Use of Ambonese Malay." *Papers in Austronesian Linguistics* 83-123.
- Hogg, Michael A., Deborah J. Terry, dan Katherine M. White. 1995. "A Tale of Two Theories: A Critical Comparison of Identity Theory with Social Identity Theory." *Social Psychology Quarterly* 255–269.
- Jimmy Ayal, "Lima Orang Meninggal dalam Bentrokan Warga Desa Seith vs Negeri Lima," *Antara News*

(Diakses pada tanggal 20 Juli 2019).

- Knaap, G. 1995. "The Demography of Ambon in the Seventeenth Century: Evidence from Colonial Protocensuses." *Journal of Southeast Asian Studies* 227–241.
- Knaap, Gerrit J. 1991. "A City of Migrants: Kota Ambon at the End of the Seventeenth Century." *Indonesia* 105–128.
- Lombard, Denys. 2008. *Nusa Jawa: Silang Budaya I*. Jakarta: Gramedia.
- Manusama, Z. J., and Chris F. van Fraassen. 1977. "Historie en socialestructuur van Hitu tot het midden der zeventiende eeuw."
- Meyerhoff, Miriam. 2006. *Introducing Sociolinguistics*. New York: Routledge.
- Misztal, Barbara A. 2003. *Theories of Social Remembering*. London: Open University Press.
- Oppenheimer, Stephen. 2004. *Out of Eden: The Peopling of the World*. London: Robinson.
- Rahman Patty, "Gubernur Maluku Minta Insiden Wakal-Hitu Diproses Hukum," *Kompas* (Diakses pada tanggal 20 Juli 2019).
- Ratnawati, Tri. 2006. *Maluku Dalam Catatan Seorang Peneliti*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Schiffman, Harold F. 1996. *Linguistic Culture and Language Policy*. London: Routledge.
- Sarup, Madan. 1996. *Identity, Culture and The Postmodern World*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Tajfel, Henri. 1981. *Human Groups and Social Categories: Studies in Social Psychology*. New York: Cambridge University Press.

### Daftar Gambar dan Tabel

Gambar 1

Wikipedia. "Ambon Island." (Diakses pada 12 September 2019).

Tabel 1

Barbara Dix Grimes, "The development and use of Ambonese Malay," *Papers in Austronesian Linguistics* (1991): 103.